

TAJUK RENCANA

Mengatasi Kecurangan Pemilu

WACANA penggunaan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan capres Ganjar Pranowo belum mendapat dukungan resmi di parlemen. Usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi pembahasan resmi di DPR. Dipastikan bila usulan tersebut dibahas di DPR bakal menjadi polemik panjang dan memantik pro-kontra, bahkan bisa memunculkan perpecahan.

Seperti diketahui, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran undang-undang oleh eksekutif. Hak angket ini bisa berbuah pemakzulan terhadap presiden bila Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat presiden melanggar undang-undang atau pelanggaran berat. Namun, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran, tentu butuh proses panjang. Pun belum tentu semua fraksi di DPR setuju digunakannya hak tersebut.

Selama ini baru PDI Perjuangan yang menyatakan tegas siap menggulirkan hak angket di DPR. Partai lain pendukung koalisi perubahan, seperti NasDem, PKB, dan PKS menyatakan siap mendukung hak angket yang dipelopori PDI Perjuangan. Namun, pernyataan tersebut masih bergulir di luar parlemen, belum secara resmi bergaung di DPR. Artinya, boleh jadi hal itu baru sekadar wacana dan belum matang. Apalagi, petinggi PPP Zarkasih Nur yang notabene pendukung capres Ganjar Pranowo menolak penggunaan hak angket karena potensial menimbulkan perpecahan.

Sementara itu, cawapres Mahfud Md enggan berkomentar hal itu. Ia tidak menyatakan menolak atau mendukung hak angket yang diusulkan pasangannya, Ganjar Pranowo. Mahfud hanya mengatakan bahwa hak angket adalah urusan partai politik, sehingga dirinya enggan berkomentar masalah itu. Namun belakangan ia menyatakan hak angket boleh saja digunakan DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pemilu.

Namun menurutnya hal itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu.

Kita juga tidak yakin bila hak angket tersebut diusulkan di DPR akan diterima secara mulus, apalagi banyak yang menentanginya. Pun akan banyak menimbulkan pertanyaan, misalnya di mana letak pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Pemilu, termasuk Pilpres 2024. Selama ini eksesalahan yang ditunjukkan kepada Jokowi lebih banyak bermuatan politis, bukan hukum. Karenanya, bila kasusnya hendaknya dibawa ke ranah hukum, nampaknya akan sulit menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan presiden.

Apalagi, bila dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu yang notabene dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti disebut dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU adalah lembaga independen sebagai penyelenggara pemilu. Jadi, kalau terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, maka pertanggungjawaban bukan pada presiden melainkan KPU.

Kalau hendak permasalahan hasil pemilu, termasuk dugaan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaannya, sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK-lah yang akan menyidangkan perkara perselisihan atau sengketa hasil pemilu, selain Bawaslu. Dengan demikian sudah tepat bila soal dugaan kecurangan dalam pemilu dibawa ke MK untuk disidangkan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri ketika ditanya wartawan mengatakan, silakan kalau ada kecurangan dalam Pemilu diusut.

Pernyataan Jokowi memang terkesan normatif, namun itulah jalur hukum yang bisa dipergunakan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, yakni melalui MK. Secara struktural KPU juga tidak berada di bawah kekuasaan presiden, karena merupakan lembaga independen. Maka dari itu, wacana untuk menggunakan hak angket atas dugaan kecurangan dalam pemilu rasanya kurang tepat. □d

Cemas Harga Komoditas Beras

Andi Ismoro

SEJAK setahun terakhir harga komoditas beras baik kualitas bawah, kualitas medium bahkan kualitas premium membuat cemas karena terus mengalami kenaikan. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kemarau panjang yang dialami hampir di seluruh wilayah Indonesia karena efek fenomena El Nino menjadi salah satu penyebab turunnya produksi gabah petani. Sehingga menyebabkan harga komoditas beras melambung tinggi. Belum lagi menghadapi fluktuasi harga pasar pada momen tertentu misalnya jelang hari raya keagamaan, atau jelang tahun baru, harga beras semakin melambung.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa harga beras menjadi salah satu pemicu inflasi di 28 provinsi pada Januari 2024. BPS juga menyebutkan kenaikan harga beras ini telah terdeteksi pada level produsen atau pada tingkat petani. Kenaikan dipicu kenaikan harga gabah baik gabah kering giling (GKG) ataupun gabah kering panen (GKP), serta persaingan penawaran harga gabah juga tentu terjadi antara pembeli gabah baik kepada petani dan penggilingan karena minimnya ketersediaan barang pada tingkat produsen. Rantai bisnis komoditas beras ini tentu tidak berhenti pada tingkatan tersebut. Pada tingkat perdagangan besar, para pedagang tentu mempunyai strategi untuk menjaga kestabilan harga dagangan mereka mereka dengan berbagai upaya.

Secara nasional BPS mencatat perubahan rata rata harga gabah pada tingkat petani sebesar pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar Rp 8.097, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 2.97% m-to-m dan 18.64% y-on-y untuk GKG. Sedangkan untuk GKP pada bulan yang sama tercatat sebesar Rp 6.925, disebutkan mengalami kenaikan sebesar 4.85% m-to-m dan 24.52% y-on-



KR-JOKO SANTOSO

13.588, sedangkan pada tingkat eceran rata rata harga beras mencapai Rp 14.380.

Yogyakarta

Bagaimana kondisi Yogyakarta? Laporan BPS DIY pada rilis berita awal Februari lalu menyebutkan bahwa rata rata harga GKG pada Januari 2024 tercatat sebesar Rp 7.716,67 pada tingkat petani. Sedangkan GKG pada tingkat penggilingan sebesar Rp 7.808,33. Harga gabah tertinggi pada varietas Ciherang, Situbagendit, IR-64, dan Inpari yaitu sebesar Rp 7.900,00/kg. Sebagai informasi bahwa Perbadan no. 6 tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 menyebutkan bahwa HPP GKG pada tingkat penggilingan adalah Rp 6.200/kg. tidak jauh berbeda dengan kondisi secara nasio-

Mitigasi dan Antisipasi Bencana Alam

Paulus Mujiran

DI PUNCAK musim penghujan ini kewaspadaan terdapat bencana sangat diperlukan. Banjir yang terjadi di beberapa daerah di tanah air merupakan bencana yang selalu berulang setiap tahun. Kerugian yang ditimbulkannya juga tidak kecil. Karena pasti akan berdampak pada aktivitas ekonomiarganya. Belum lagi kerusakan infrastruktur publik. Ancaman bencana berupa banjir dan tanah longsor memang terjadi setiap saat terutama di musim penghujan. Yang menyedihkan kesiapan kita menghadapi bencana tidaklah memadai.

Pemerintahlah sebagai pihak yang kerap disalahkan. Dianggap tidak memperbaiki saluran air, kurang tegas dalam menindak para pembuang sampah, membiarkan pembalakan liar dan gorong-gorong lama tersumbat sehingga meluap ke jalan. Kemampuan menghadapi banjir dan tanah longsor sangat terbatas. Kekhawatiran terhadap bencana kian besar karena kita tidak memiliki kemampuan memitigasi lebih awal potensi bencana dan mengambil tindakan tepat untuk mencegahnya.

Bagi negara yang sering dilanda bencana kita semestinya memiliki kemampuan mendeteksi, mitigasi, pencegahan hingga penanganan pascabencana. Kurang terkoordinasinya penanganan bencana mencerminkan kesiapan pemerintah dan masyarakat sangat terbatas. Yang muncul ke permukaan kemudian adalah sikap menyalahkan tetapi tidak ada yang berani memikul tanggung jawab.

Meminimalkan Korban

Karena itu upaya mencegah terjadinya bencana jauh lebih penting agar jatuhnya korban dan kerugian dapat dihindari. Kemampuan mencegah terjadinya bencana dan pengetahuan mengenai cara-cara ketika terjadi bencana akan meminimalkan korban yang jatuh. Semakin masyarakat paham cara berhadapan dengan bencana maka kerugian

karena hilangnya harta benda dan kematian yang sia-sia dapat dihindarkan. Setidaknya masyarakat diajak untuk mengetahui karakter bencana yang sering terjadi. Mengajak masyarakat untuk peduli pada persoalan-persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari perlu terus ditanamkan. Kebiasaan membuang sampah yang buruk memberi kontribusi terjadinya banjir sudah menjadi kebiasaan yang dibiarkan. Masyarakat yang suka membuang sampah di sungai terbukti memberi andil terjadinya penyumbatan aliran air dan meluapnya sungai ke kawasan sekitar.

Kebiasaan lain yang dapat dipraktikkan misalnya ikut melakukan penanaman hutan peneduh dan membuat lubang biopori yang dapat menolong dalam peresapan air hujan. Mengurangi penutupan permukaan tanah dengan semen sehingga peresapan air yang berlangsung dengan baik. Penanaman pohon peneduh ini selain membantu mengurangi penguapan juga sangat menolong air hujan meresap ke dalam tanah. Selain itu perlu upaya membangun masyarakat memiliki daya tahan terhadap bencana agar kesiapsiagaan terbangun.

Di saat yang sama mengintegrasikan pengetahuan tentang pengelolaan bencana melalui kurikulum di sekolah harus menjadi kebutuhan. Dengan mendidik anak-anak sekolah berkembang kesadaran dan pengetahuan dalam menghadapi bencana. Anak-anak sekolah adalah agen strategis bagi anak yang bersangkutan maupun bagi orang tua dan masyarakat. Kearifan seperti ini kalau tertanam di kalangan anak-

nal, harga beras di DIY hingga saat ini juga dirasakan sangat tinggi oleh masyarakat.

Sangat berbahaya apabila komoditas pokok hanya diserahkan kepada hukum pasar. Perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tentu tidak mudah mengatasi permasalahan ketahanan pangan untuk mencukupi kebutuhan beras. Menjadi dilema ketika di satu sisi harga gabah petani mengalami kenaikan sehingga kesejahteraan petani akan meningkat. Namun harga komoditas beras yang tinggi tentu akan berdampak serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hingga saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan berbagai langkah terutama untuk sesegera mungkin menurunkan harga beras sampai musim panen sub-round I tahun 2024. Langkah Perum Bulog baru-baru ini melaksanakan program Bulog Siaga yang menjual beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat diberbagai tempat. Harapannya, mampu mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat sehingga mengurangi keresahan masyarakat untuk mendapatkan komoditas pangan murah. □d

*) **Andi Ismoro SE MM**, statistisi pertama BPS DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

anak sekolah akan sangat membantu pembedayaan sadar bencana dalam masyarakat.

Pemimpin Peka Bencana

Tidak kalah penting di saat yang sama kita membutuhkan pemimpin yang peka terhadap bencana. Seorang gubernur, bupati/walikota adalah sosok penting dalam keadaan bencana. Apa gunanya mempercantik kota kalau dalam sekejap juga hancur karena banjir?

Maka kepemimpinan yang tanggap bencana menjadi relevan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, pemetaan kawasan rawan bencana baik banjir dan tanah longsor perlu dilakukan dan diinformasikan ke masyarakat luas.

Masyarakat sebenarnya mempunyai banyak potensi berhadapan dengan bencana. Kekuatan masyarakat tetap harus dikembangkan. Pemerintah memang harus mampu menggalang sumber daya dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. □d

*) **Paulus Mujiran**, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, Semarang).

Pojok KR

DIY jadi pilot project Smart City Polri. -- Berharap DIY makin mendunia. ***

Pemkot kejar revitalisasi TPS mandiri. -- Perlu evaluasi secara periodik. ***

Pelajar SMP di Wonosari jadi korban perundungan. -- Tak selalu bisa diselesaikan damai.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

✉ pikiranpembaca@gmail.com ☎ 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Muncul Jalan Rusak Usai Hujan

DUA hari ini hujan angin yang sangat deras melanda DIY. Hujan angin yang membuat tidak hanya banyak pohon tumbang di Sleman. Namun juga jadi munculnya dengan jelas lubang-lubang besar di jalan raya, di pelbagai tempat. Tentu saja mengagetkan dan sangat membahayakan. Karena ketika hujan deras dan banjir, lubang tersebut ikut tergenang.

Mungkin selama ini jalan tersebut

sudah rusak namun kurang mendapat perhatian. Ketika terus menerus diterjang air hujan dan banjir, akhirnya tidak kuat lagi dan muncul-lah lubang-lubang di jalanan tersebut. Padahal sekarang ini, tampaknya hujan belum akan pergi. Apakah jalan tersebut akan diperbaiki atau menunggu musim panas? Mangaia terserah yang sedang berkuasa mengatur semua ini. □d

*) **Yuwono ST**, Monjali Sleman

Ring-road Utara Banjir, Serasa Sungai Besar

MENDAPAT kiriman video yang rasanya menjadi miris. Ketika hujan 2 hari lalu, ring-road depan UPNV Yogya seperti sungai besar. Air setinggi roda sepeda motor dan dalam kiriman video, tampak ada pembatas jalan, rambu pengumuman yang ikut hanyut. Dan banjir di sini mungkin memang bukan pertamakali.

Padahal kalau tidak salah sekitar 10an tahun lalu ada pembangunan

gorong-gorong yang besar sekali bis-bis beton yang hendak dipasang. Rasanya kalau ada jalan air dan normal, tidak akan membuat banjir. Dan gorong-gorong itu dulu dipasang sepanjang Ring-road sampai jauh, kalau gak salah sampai simpangtiga Jl Solo. Apakah gorong-gotong tersebut sudah tidak berfungsi? Terus terang realita ini membingungkan saya. □d

Dra Ninik, xxxxxxxxxx08

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisar Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirnon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustivi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutaadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)